

**ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN PENDIDIKAN  
DI KABUPATEN BOYOLALI**



**NASKAH PUBLIKASI**

Disusun oleh :

**Nisaaul Mardiyah**

**B200100247**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2014**

## HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul :  
**ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN  
BOYOLALI**

Yang ditulis oleh :

**NISAAUL MARDLIYAH**

**B 200 100 247**

Penandatanganan berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat  
untuk diterima.

Surakarta, Juli 2014

Pembimbing

(Dr. Zulfikar, SE, M.Si)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, M.Si, Ak)

# **ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BOYOLALI**

NISAAUL MARDLIYAH  
(B200100247)  
[nisaaitubambul@gmail.com](mailto:nisaaitubambul@gmail.com)

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

## **ABSTRAKSI**

Salah satu cara pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan meningkatkan mutu pendidikan, cara yang ditempuh adalah melalui peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan, dengan minimal 20% dari anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi anggaran pendidikan tersebut dengan obyek Kabupaten Boyolali, khususnya pada tahun anggaran 2010 dan 2011.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa dokumen yang tersedia di DPPKAD dan BPS, serta data olahan dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Boyolali. Data yang diperlukan bersangkutan dengan kinerja pemerintah dan APBD tahun 2010 dan 2011.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis capaian kinerja program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun cenderung tidak stabil namun masih diatas rata-rata 80% atau dalam kategori cukup baik. Hasil analisis penyerapan anggaran dengan hasil lebih dari 95% menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran cukup tinggi. Hasil analisis rata-rata lama belajar menunjukkan bahwa rata-rata lama belajar siswa sesuai dengan standar, yaitu 6 tahun untuk siswa tingkat SD/MI dan 3 tahun untuk siswa SMP/MTs. Hasil analisis input-output tingkat SD/MI tahun 2011 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan tingkat SMP/MTs jumlah siswa yang masuk lebih besar dibandingkan jumlah siswa yang lulus.

kata kunci: *pencapaian kinerja, penyerapan anggaran pendidikan, rasio input-output*

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan mendapat perhatian khusus dari pemerintah dibanding dengan sektor lain karena pendidikan merupakan pilar utama dalam pengembangan

manusia, sehingga mampu menciptakan masyarakat yang cerdas dan berwawasan luas. Pembangunan pendidikan merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dengan keberhasilan dalam membangun pendidikan dapat memberikan sumbangan pada pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan. Pemerintah dalam hal ini berusaha mewujudkannya melalui Peraturan Pemerintah No 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, menetapkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Salah satu kunci peningkatan kualitas pendidikan adalah dengan kebijakan anggaran. Anggaran pendidikan yang rendah kerap kali berbanding lurus dengan mutu pendidikan yang rendah. Selain itu, meskipun belanja pendidikan telah ditingkatkan, masih terdapat perbedaan output dan pencapaian. Hal ini disebabkan karena ketidakefisienan pengelolaan dan pembelanjaan anggaran, dimana tingkat efisiensi diperoleh dengan memperkirakan efektivitas biaya dari input yang diberikan dengan output yang diperoleh, dan membandingkan unsur-unsur tersebut dengan sasaran pendidikan di kabupaten. Reinikka dalam Desi (2012) menyebutkan bahwa kurangnya keselarasan antara perencanaan dan penyusunan anggaran serta inefisiensi dalam alokasi anggaran dapat menghambat pencapaian sebagaimana yang diharapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi anggaran pendidikan melalui capaian kinerja pelayanan pendidikan, penyerapan anggaran, dan analisis efisiensi

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Alokasi Anggaran Pendidikan**

Alokasi anggaran pendidikan telah diatur dalam UU No. 10 Tahun 2010 tentang APBN TA 2011, yang menyatakan bahwa Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian Negara/Lembaga. Alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kediknasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah (pasal 1 butir 48).

### **Pembiayaan Pendidikan**

Pembiayaan pendidikan dasar adalah sejumlah uang yang dikeluarkan guna berbagai macam kepentingan pendidikan, pembelian sarana-prasarana, gaji tenaga pendidik dan sebagainya, pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs atau sederajat). (Wibowo, 2013).

### **Efisiensi Pendidikan**

Konsep dasar efisiensi pendidikan adalah memberikan hasil output terbaik, yaitu aspek konsumtif yang berhubungan dengan kesenangan dan manfaat-manfaat yang diterima oleh siswa, keluarganya, dan masyarakat keseluruhan, serta aspek inventatif yang mencakup berbagai output yang berkaitan dengan tujuan mempertinggi keahlian individu dan masyarakat di masa depan (Suhardan, dkk.2012) dengan biaya seminimal mungkin.

## **Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun**

Dalam pelaksanaan program Wajib Belajar 9 tahun, sebagai payung hukumnya pemerintah telah menyiapkan PP No. 47 tahun 2008. Dalam ketentuan umum, disebutkan bahwa program wajib belajar diselenggarakan untuk memberikan pelayanan pendidikan dasar seluas-luasnya kepada warga Negara Indonesia tanpa membedakan latar belakang agama, suku, sosial, budaya, dan ekonomi. Setiap warga Negara Indonesia usia wajib belajar berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan orang tua/wali berkewajiban memberi kesempatan kepada anaknya untuk mendapatkan pendidikan dasar.

## **Teori Pencapaian Kinerja**

Pengukuran kinerja organisasi sektor publik meliputi aspek masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) (Anggraini dan Puranta, 2010). Pada pemerintah daerah, pengukuran kinerja merupakan penilaian terhadap *input-output-outcome-benefit-impact*, sedangkan *benefit* pada dasarnya merupakan *outcome* jangka menengah dan *impact* adalah *outcome* jangka panjang. Sehingga dalam perencanaan anggaran pemerintah daerah indikator *benefit* dan *impact* tidak dapat diestimasikan dalam periode satu tahun anggaran.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pemilihan Sampel dan Pengumpulan Data**

Populasi dalam penelitian ini adalah semua sekolah di Kabupaten Boyolali. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2007). Teknik

sampel ini dipilih karena sampel yang digunakan berhubungan dengan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, sehingga sampel yang diambil adalah semua SD/MI dan SMP/MTs baik Negeri maupun Swasta di Kabupaten Boyolali.

### **Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang tersedia di DPPKAD dan Disdikpora Kabupaten Boyolali.

### **Metode Analisis Data**

#### **1. Analisis Capaian Kinerja Pendidikan Dasar 9 Tahun**

Analisis capaian kinerja pendidikan diketahui melalui indikator kinerja. Indikator tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu *input*, *output* dan pencapaian. Analisis *input* mencakup kualifikasi guru, kualifikasi kepala sekolah, rasio hubungan siswa-guru-rombel, keadaan fisik, angka kecukupan jumlah sekolah. Analisis *output* mencakup Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, Angka Putus Sekolah, dan Angka Tinggal Kelas, sedangkan analisis pencapaian menggunakan angka kelulusan.

#### **2. Analisis Penyerapan Anggaran**

Analisis ini dilakukan dengan membandingkan rencana dengan realisasi APBD untuk sektor pendidikan. Nilai kewajaran rasio antara realisasi dan rencana anggaran tidak lebih kurang dari 95%. Semakin tinggi angka penyerapan maka semakin tinggi pula pula tingkat akurasi proses perencanaan anggaran dan semakin besar pula potensi pengaruh belanja pendidikan Pemerintah Daerah dalam mempengaruhi kualitas pelayanan pendidikan.

### 3. Rata-rata Lama Belajar (*Average Study Time*)

Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa lama lulusan dalam menggunakan waktu belajar, menggunakan metode statistik *kohort* (kelompok belajar). Analisis ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Rata-rata Lama Belajar: } \frac{\text{Lama Belajar Siswa}}{\text{Jumlah Siswa masuk}}$$

### 4. Input-Output Ratio

Rasio ini membandingkan antara murid yang lulus dengan murid yang masuk awal dengan memperhatikan waktu standar untuk lulus. lebih tepatnya, rasio ini membandingkan antara tingkat masukan dan keluaran dalam pendidikan Analisis ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio Input-Output: } \frac{\text{Jumlah Siswa Masuk}}{\text{Jumlah Siswa Keluar}}$$

## ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisis Pencapaian Kinerja

#### 1. Pendidikan SD/MI

##### a. Analisis Input

##### 1) Kualifikasi Guru SD/MI

Kualifikasi guru SD/MI Negeri telah memenuhi standar kualifikasi minimal sebesar 40% sedangkan SD/MI Swasta belum memenuhi standar tersebut.



## 2) Kualifikasi Kepala Sekolah SD/MI

Kualifikasi kepala sekolah SD/MI Negeri telah memenuhi standar kualifikasi minimal sebesar 75% sedangkan SD/MI Swasta belum memenuhi standar tersebut.

## 3) Rasio Hubungan Siswa-Guru-Rombel Guru SD/MI

Capaian kinerja baik Negeri maupun Swasta tidak efisien, karena berdasarkan Standar Nasional seorang guru SD/MI mengajar 28 siswa, dan hasil analisis menunjukkan 1 rombel kurang dari Standar Nasional 28 siswa. Hal yang sama juga terjadi pada capaian kinerja hubungan siswa dengan rombel dimana satu rombel digunakan 28 siswa yang belum memenuhi Standar Nasional.

Capaian kinerja baik Negeri maupun Swasta terhadap satu guru pada satu rombel. Capaian kinerja baik Negeri/Swasta terdapat kelebihan guru, namun tidak dapat dipungkiri ada beberapa kecamatan yang mengalami kekurangan guru, sehingga perlu diadakan transfer guru dari kecamatan lain.

## 4) Prosentase Keadaan Fisik SD/MI

Capaian kinerja baik Negeri/Swasta memiliki prosentase tinggi, namun untuk keadaan fisik rusak pada sekolah Swasta cukup tinggi.

## 5) Angka Kecukupan Jumlah Sekolah di Tingkat SD/MI

Capaian kinerja baik Negeri/Swasta memiliki kelebihan sekolah, namun untuk SD/MI Negeri mendekati ideal.

b. Analisis Output

1) Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD/MI

APK mengalami penurunan, namun masih di atas 80%.

2) Angka Partisipasi Murni Tingkat SD/MI

APM mengalami penurunan, namun masih di atas 80%.

3) Angka Putus Sekolah SD/MI

Capaian kinerja baik Negeri/Swasta telah memenuhi Standar Nasional dalam angka putus sekolah yaitu di bawah 1%.

4) Angka Tinggal Kelas SD/MI

Capaian kinerja baik Negeri/Swasta angka tinggal kelas masih di atas standar nasional yaitu di atas 1%.

c. Analisis Pencapaian Kinerja

Capaian kinerja baik Negeri/Swasta telah memenuhi standar nasional dengan angka kelulusan di atas 90%.

**2. Pendidikan SMP/MTs**

a. Analisis Input

1) Kualifikasi Guru SMP/MTs

Capaian kinerja baik Negeri/Swasta tahun 2010 dan 2011 sudah memenuhi kualifikasi minimal akademik S1 sebesar 40%.

2) Kualifikasi Kepala Sekolah SMP/MTs

Capaian kinerja baik sekolah Negeri/Swasta tahun 2010 dan 2011 sudah memenuhi kualifikasi minimal akademik S1 sebesar 75%.

### 3) Rasio Hubungan Siswa-Guru-Rombel Guru SMP/MTs

Capaian kinerja baik Negeri/Swasta tidak efisien, karena tidak memenuhi standar nasional, yaitu 1 rombel terdapat 3 guru mapel.

Capaian kinerja baik Negeri sudah memenuhi angka ideal, namun untuk sekolah Swasta tidak efisien karena setiap rombel kurang dari 32 siswa.

Capaian kinerja baik Negeri/Swasta terdapat kelebihan guru, namun ada beberapa kecamatan yang kekurangan guru, sehingga perlu diadakan transfer guru dari Kecamatan lain.

### 4) Prosentase Keadaan fisik SMP/MTs

Capaian kinerja baik Negeri/Swasta memiliki prosentase tinggi, namun untuk keadaan fisik rusak pada sekolah Swasta cukup tinggi.

### 5) Angka Kecukupan Jumlah Sekolah di Tingkat SMP/MTs

Capaian kinerja baik Negeri/Swasta menunjukkan angka ideal, sedangkan untuk sekolah Swasta mengalami kelebihan sekolah.

## b. Analisis Output

### 1) Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs

APK mengalami penurunan, namun masih di atas 80%.

### 2) Angka Partisipasi Murni SMP/MTs

APM mengalami penurunan, namun masih di atas 80%.

### 3) Angka Putus Sekolah SMP/MTs

Capaian kinerja baik Negeri/Swasta telah memenuhi standar nasional yaitu di bawah 1%.

#### 4) Angka Tinggal Kelas SMP/MTs

Capaian kinerja baik Negeri/Swasta angka tinggal kelas telah memenuhi standar nasional yaitu di bawah 1%.

#### c. Analisis Pencapaian Kinerja Pendidikan

Capaian kinerja baik Negeri/Swasta telah memenuhi standar nasional dengan angka kelulusan di atas 90%.

#### **Hasil Analisis penyerapan Anggaran**

Penyerapan anggaran pendidikan di Kabupaten Boyolali telah memenuhi Standar Nasional dengan realisasi anggaran tidak kurang dari 95%.

#### **Hasil Analisis Rata-Rata Lama Belajar**

Hasil analisis menunjukkan di Kabupaten Boyolali siswa telah memenuhi standar rata-rata lama belajar, yaitu pada tingkat SD/MI rata-rata lama belajar seorang lulusan adalah 6 tahun, dan di tingkat SMP/MTs adalah 3 tahun.

#### **Hasil Analisis Rasio Input-Output**

Hasil analisis menunjukkan di Kabupaten Boyolali perbandingan antara jumlah siswa baru yang masuk dengan siswa yang lulus stabil.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis capaian kinerja program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan belanja pendidikan cenderung tidak stabil namun masih diatas rata-rata 80% atau kategori cukup baik. Tersedianya pelayanan pendidikan dasar yang

bermutu dan merata, serta meningkatnya mutu pendidikan telah menunjukkan pencapaian sesuai yang direncanakan, yaitu tidak kurang dari 80%.

2. Hasil analisis penyerapan anggaran menunjukkan bahwa penyerapan anggaran pendidikan di Kabupaten Boyolali telah memenuhi Standar Nasional dengan realisasi anggaran tidak kurang dari 95%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran sektor pendidikan di Kabupaten Boyolali cukup tinggi.
3. Hasil analisis rata-rata lama belajar pada tingkat SD/MI menunjukkan hasil yang stabil, pada tahun 2010 sebesar 6,04 dan tahun 2011 sebesar 6,04. Pada tingkat SMP/MTs rata-rata lama belajar di tahun 2010 dan 2011 stabil, yaitu di angka 3,00. Hal ini menunjukkan bahwa di tingkat SD/MI rata-rata lama belajar seorang lulusan adalah 6 tahun, dan di tingkat SMP/MTs adalah 3 tahun.
4. Hasil analisis rasio input-output di tingkat SD/MI menunjukkan hasil yang cukup stabil yaitu pada tahun 2010 sebesar 94,31% dan tahun 2011 sebesar 89,91% sedangkan di tingkat SMP/MTs pada tahun 2010 99,54%, tahun 2011 sebesar 103,03%. Hal ini menunjukkan bahwa perbandingan antara jumlah siswa baru yang masuk dengan siswa yang lulus stabil.

## **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah diambil, maka dapat dikemukakan saran bagi peneliti mendatang hendaknya dapat meneliti dengan obyek lebih luas ke sejumlah kabupaten atau provinsi yang ada di Indonesia dan juga meneliti lebih lanjut tidak hanya terbatas pada tingkat efisiensi namun juga efektivitas anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalina, Desi. 2012. *Analisis Belanja Publik Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Kinerja Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Boyolali*. (skripsi yang tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS: Surakarta.
- Anggraini, Yunita, dan Hendra Puranta. 2010. *Anggaran Berbasis Kinerja: Penyusunan APBD Secara Komprehensif*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- BEC-TF. 2008. *Pedoman Praktis: Analisis Belanja Publik Pendidikan Dasar di Tingkat Kabupaten/Kota*.
- Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Gorontalo: PT Indeks.
- Fatah, Nanang. 2000. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fatah, Nanang. 2012. *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Harsono. 2008. *Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Surayajaya Press.
- Lestari, Ade Hapsari. 2013. *Anggaran Pendidikan 2013 Naik Jadi Rp345,3 Triliun*. (online), (<http://kampus.okezone.com/read/2013/06/27/373/828584/anggaran-pendidikan-2013-naik-jadi-rp345-3-triliun>, diakses 23 Agustus 2013).
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Muhaimin, dkk. 2010. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Permendiknas No. 13 tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah.
- Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang pembiayaan antar-pemerintah untuk sektor pendidikan.

Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun.

Siaran Pers. 2013. *Belanja Lebih Banyak atau Belanja Lebih Baik: Memperbaiki Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*. (online), (<http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2013/03/14/spending-more-or-spending-better-improving-education-financing-in-indonesia>, diakses tanggal 23 Agustus 2013).

Suhardan, Dadang, Ridwan, dan Enas. 2012. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Dasar No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Wibowo, Agus. 2013. *Akuntabilitas untuk Meningkatkan Mutu dan Citra Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

World Bank. 2008. *Investasi dalam Pendidikan pada Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia*. Jakarta: Indonesia.